

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

Wawan Ichwanudin
ichwan0308@untirta.ac.id
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sugeng Setiadi
sugeng.setyadi@untirta.ac.id
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lebak masih rendah. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti potensi pendapatan daerah di Kabupaten Lebak dan merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Lebak. Metode yang digunakan untuk menganalisis potensi ekonomi adalah analisis tipologi kelas, sedangkan metode untuk merumuskan kebijakan adalah analisis Kekuatan dan Kelemahan.

Penggunaan alat analisis Tipologi Klassen telah mampu menggambarkan kondisi sesuai dengan realisasi dan serupa dengan hasil alat analisis lainnya, seperti hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas terdapat lima sektor yang diklasifikasikan sebagai sektor unggul, yaitu sektor (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri Pengolahan (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (5) Real Estate. Berdasarkan analisis strategi Kekuatan dan Kelemahan dapat dirumuskan strategi untuk masing-masing sektor unggulan, jika strategi tersebut diimplementasikan maka dapat menjadi pendorong meningkatnya pendapatan daerah Kabupaten Lebak sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lebak.

Keyword : Kemandirian keuangan daerah; optimalisasi pendapatan daerah; tipologi kelas; potensi ekonomi

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator daerah yang berhasil melaksanakan otonomi daerah adalah kemandirian keuangan daerah, artinya daerah memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, sehingga daerah tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Febby (2016), mendefinisikan kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan keuangan daerah tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu PAD, kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian. Rasio kemandirian

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat.

Studi tentang kemandirian keuangan daerah pada berbagai kabupaten / kota telah banyak dilakukan, dari beberapa penelitian tersebut banyak yang membuktikan bahwa kemandirian keuangan daerah terbukti masih rendah. Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pengukuran kemandirian keuangan daerah. Rinaldi Syahputra (2017) Secara rata-rata dalam 6 tahun periode observasi 2009-2014 derajat desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah, karena angkanya masih dibawah 10%. Laedy Tamboto., J. Morasa., L. Mawikere (2014) Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara selama lima tahun anggaran (2008-2012) berkisar antara 8,35% sampai dengan 12,71%. Putri Nia Desita (2015) selama lima tahun periode penelitian (2010-2014) rasio kemandirian keuangan Kota Pekanbaru rata – rata 24,24. Hasil studi R. Agoes Kamaroellah (2017) Rasio kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata ratanya adalah 36,53% masih berada diantara 25% - 50% .

Demikian hal nya di Kabupaten Lebak, berdasarkan data tahun 2015 -2016, tergambar bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lebak masih rendah, rasionya kurang dari 20%. Tabel 1 adalah Rasio antara PAD terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Lebak tahun 2015-2016.

Tabel 1. Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

Keterangan	2015	2016	Growth
PAD	Rp263.829.616.592	Rp320.167.214.575	0,214
Total Pendapatan (TP)	Rp2.211.644.380.758	Rp2.467.918.017.339	0,116
% PAD terhadap TP	0,1193	0,1297	

Sumber : Lebak Dalam Angka Tahun 2016 dan 2017

Studi ini tidak mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, tetapi untuk memformulasikan solusi mengatasi rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lebak. Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah maka berdasarkan formulasi rasio kemandirian, yang harus dilakukan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mukhtar Hakim, dkk (2018) strategi prioritas yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan PAD adalah peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam studinya Mukhtar Hakim, dkk (2018) di Kabupaten Anambas menyimpulkan bahwa rendahnya PAD disebabkan karena target penerimaan PAD belum berdasarkan potensi daerah yang ada, tetapi target

penerimaan PAD dihitung berdasarkan persentase tahun sebelumnya. Dengan demikian untuk meningkatkan PAD maka yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi potensi ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Lebak harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber-sumber penerimaan daerah dapat dicari dan dapat direalisasikan dalam bentuk penerimaan daerah.

Menurut Mahmudi (2010) bahwa potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karenanya kebijakan suatu daerah dengan daerah lainnya terkait upaya meningkatkan pendapatan daerah akan berbeda-beda. Ketersediaan informasi tentang potensi daerah menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti potensi pendapatan daerah di Kabupaten Lebak dan merumuskan strategi dan kebijakan untuk peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Lebak dengan menggunakan analisis tipologi klassen. Secara lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur sektor-sektor yang ada di Kabupaten Lebak, sehingga dapat diklasifikasikan kedalam sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang, selanjutnya berdasarkan klasifikasi sektor-sektor yang telah diidentifikasi selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan yang relevan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lebak.

LANDASAN TEORI

Penelitian Terdahulu Tentang Kemandirian Keuangan Daerah

Studi tentang kemandirian keuangan daerah pada berbagai kabupaten / kota telah banyak dilakukan, dari beberapa penelitian tersebut banyak yang membuktikan bahwa kemandirian keuangan daerah, dengan menggunakan berbagai indikator pengukuran, terbukti masih rendah. Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pengukuran kemandirian keuangan daerah.

Rinaldi Syahputra (2017) Secara rata-rata dalam 6 tahun periode observasi 2009-2014 derajat desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah, karena angkanya masih dibawah 10%. Laedy Tamboto., J. Morasa., L. Mawikere (2014) Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara selama lima tahun anggaran (2008-2012) berkisar antara 8,35% sampai dengan 12,71%. Putri Nia Desita (2015) selama lima tahun periode penelitian (2010-2014) rasio kemandirian keuangan Kota Pekanbaru rata – rata 24,24. Hasil studi R. Agoes

Kamaroellah (2017) Rasio kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata ratanya adalah 36,53% masih berada diantara 25% - 50%

Menindaklanjuti hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian ini akan merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini akan mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang memiliki potensi (potensi ekonomi daerah) yang sangat kuat untuk menopang pembangunan di Kabupaten Lebak, sehingga berdasarkan potensi ekonomi daerah tersebut pemerintah kabupaten lebih dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam meningkatkan PAD.

Tipologi Klaasen Sebagai Model Identifikasi Potensi Ekonomi

Beberapa peneliti telah menggunakan model untuk mengidentifikasi potensi ekonomi daerah, yaitu Tipologi Klassen, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Overlay*, *Location Quotient* (LQ), dan *Shift share*, *Gain Index*, *Index Williamson*. *Shift share* mengukur kinerja dan produktivitas sektor perekonomian daerah melalui perbandingan antara laju pertumbuhan sektoral ekonomi regional dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tingkatannya. LQ digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan suatu sektor ke dalam sektor basis dan nonbasis. LQ merupakan peluasan analisis *Shift share*. MRP adalah peluasan analisis LQ dengan *Shift share* yang telah dimodifikasi. Analisis *Overlay* merupakan penggabungan hasil dari perhitungan *Shift share* dan LQ. Tipologi Klassen adalah penggabungan hasil dari perhitungan LQ dan MRP.

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menggunakan Tipologi Klassen, metode ini memiliki keunggulan yaitu lebih efisien dalam perhitungan karena telah mengadopsi dua hasil perhitungan yaitu LQ dan MRP. Penggunaan alat analisis Tipologi Klassen telah mampu menggambarkan kondisi sesuai dengan realisasi dan serupa dengan hasil alat analisis lainnya, seperti hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti dikutip oleh Luh Nyoman Fajar Nur Ayu, Ni Luh Putu Wiagustini (2016), menunjukkan bahwa hasil penelitian menggunakan Tipologi Klassen berkesesuaian atau konsisten dengan hasil penelitian menggunakan metode-metode lainnya. Berikut ini hasil-hasil penelitian yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian menggunakan Tipologi Klassen dan berbagai metode analisis lainnya yang dikutip oleh Luh Nyoman Fajar Nur Ayu, Ni Luh Putu Wiagustini (2016).

Suwandi (2016) meneliti di Jayapura pada tahun 2009-2014. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, LQ dan *Shift share*, sektor unggulan Jayapura adalah sektor bangunan. Sektor potensial terdiri dari sektor transportasi dan komunikasi; sektor pertanian; sektor jasa; sektor listrik, air dan gas; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor berkembang terdiri dari

sektor perdagangan, hotel dan restoran; penggalan dan pertambangan; industri pengolahan. Sektor pertanian merupakan sektor tertinggal di Jayapura.

Endi, dkk. (2015) meneliti di Kota Bandar Lampung pada tahun 2000-2012. Berdasarkan hasil perhitungan dengan Tipologi Klassen, LQ dan *Shift share*, sektor ekonomi maju yang tumbuh pesat atau sektor basis yang memberikan kontribusi positif dan memiliki pertumbuhan relatif cepat di Kota Bandar Lampung adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; industri pengolahan.

Dearlinasinaga (2015) meneliti di Simalungun pada tahun 2005-2011. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen dan LQ, sektor basis dan merupakan sektor unggulan Simalungun adalah sektor jasa. Mahmud (2015) meneliti di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, sektor maju dan tumbuh cepat di Kabupaten Nganjuk adalah sektor pertanian. Berdasarkan hasil analisis LQ dan *Shift share*, sektor basis yang menjadi unggulan di Kabupaten Nganjuk adalah sektor pertanian. Ratnasari (2014) meneliti di Kabupaten Kebumen pada tahun 2005-2009. Berdasarkan hasil perhitungan *Shift share*, LQ, MRP, Tipologi Klassen, dan *Overlay* sektor penggalan dan pertambangan adalah sektor maju dan tumbuh dengan pesat atau sektor basis di Kabupaten Kebumen.

Wahyuningtyas (2013) meneliti di Kabupaten Kendal pada tahun 2006-2010. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, sektor prima di Kabupaten Kendal adalah sektor penggalan dan pertambangan; sektor pertanian. Menurut perhitungan LQ, sektor pertanian; sektor penggalan dan pertambangan merupakan sektor basis. Berdasarkan hasil perhitungan MRP, salah satu sektor dominan adalah sektor penggalan dan pertambangan. Hasil analisis *Overlay*, sektor dominan adalah sektor penggalan dan pertambangan; sektor pertanian. Hasil perhitungan *Shift share*, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi positif dan memiliki pertumbuhan relatif cepat di Kabupaten Kendal.

METODE PENELITIAN

Analisis data tahap pertama adalah analisis Tipologi Klassen. Tipologi Klassen adalah teknik pengelompokan suatu sektor dengan memperhitungkan pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Sektor unggul (prima),
2. Sektor potensial,
3. Sektor berkembang, dan

4. Sektor terbelakang.

Menurut Mahmudi (2009:55) untuk melakukan analisis Tipologi Klassen, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Menghitung rata-rata PDRB, menjumlahkan total PDRB kemudian dibagi dengan n tahun (n tahun = jumlah tahun penelitian). Hasil rata-rata tersebut kemudian dibagi dengan n sektor lapangan usaha (n sektor lapangan usaha = jumlah sektor lapangan usaha yang diteliti).
2. Menghitung rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB kontribusi masing-masing sektoral kemudian dibagi n tahun.
3. Menghitung rata-rata laju pertumbuhan sektoral dan rata-rata laju pertumbuhan PDRB, dengan cara menjumlahkan masing-masing sektor dan total laju pertumbuhan PDRB, kemudian dibagi n tahun.
4. Membandingkan hasil perhitungan rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB dengan rata-rata PDRB dan membandingkan hasil perhitungan rata-rata laju pertumbuhan sektoral PDRB dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB.
5. Mengklasifikasikan masing-masing sektor lapangan usaha ke dalam matriks atau kuadran Tipologi Klassen. Dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori Sektor berdasarkan Tipologi Klassen

Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB	
	$\bar{Y}_{SEKTOR} \geq \bar{Y}_{PDRB}$	$\bar{Y}_{SEKTOR} < \bar{Y}_{PDRB}$
$r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$	Sektor Unggulan	Sektor Berkembang
$r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Tahap kedua adalah penyusunan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan PAD berdasarkan analisis tipologi kelas yang telah dilakukan. Pada studi ini untuk mendapatkan strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Lebak digunakan analisis SWOT.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat diklasifikasikan masing-masing sektor lapangan usaha ke dalam matriks atau kuadran Tipologi Klassen, sebagai berikut.

Tabel 3. Klasifikasikan Masing-Masing Sektor Lapangan Berdasarkan Tipologi Klassen

Sektor	\bar{Y}_{SEKTOR}	\bar{Y}_{PDRB}	r_{SEKTOR}	r_{SEKTOR}	Kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4177210,069	899886,57	28,13914	4,877418	Unggul
Pertambangan dan Penggalian	1139424,913	899886,57	8,136667	1,580339	Unggul
Industri Pengolahan	1759702,939	899886,57	12,50614	3,732757	Unggul
Pengadaan Listrik dan Gas	7169,177969	899886,57	0,068134	10,53145	Terbelakang
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3998,680313	899886,57	0,066625	3,87545	Terbelakang
Konstruksi	912587,9988	899886,57	6,00971	14,95126	Berkembang
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2114563,451	899886,57	14,77317	6,665689	Unggul
Transportasi dan Pergudangan	939080,6775	899886,57	6,531937	7,229188	Berkembang
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	722296,5013	899886,57	4,981296	8,050591	Terbelakang
Informasi dan Komunikasi	118205,145	899886,57	0,813175	9,904536	Terbelakang
Jasa Keuangan dan Asuransi	260245,6763	899886,57	1,796812	8,287745	Terbelakang
Real Estate	1089598,526	899886,57	7,549642	7,054795	Unggul
Jasa Perusahaan	48421,2975	899886,57	0,337762	5,818649	Terbelakang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	754413,4675	899886,57	5,231863	6,609304	Terbelakang
Jasa Pendidikan	854536,5725	899886,57	5,921338	6,734833	Terbelakang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161556,5388	899886,57	1,10761	8,859743	Terbelakang
Jasa lainnya	382205,0363	899886,57	2,644421	7,120422	Terbelakang

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Hasil analisis Tipologi Klasen teridentifikasi bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ; Pertambangan dan Penggalian ; Industri Pengolahan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ; Transportasi dan Pergudangan ; dan Real Estate termasuk dalam kategori Sektor Unggulan. Dengan demikian maka sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang dapat diandalkan dan merupakan potensi yang dimiliki sebagai pendorong pertumbuhan PAD di kabupaten Lebak. Agar sektor-sektor tersebut dapat dioptimalkan sebagai pendorong pertumbuhan PAD maka sektor tersebut perlu dikembangkan, berikut ini adalah formulasi analisis SWOT, menggunakan strategi SW (Strength-Weakness) untuk pengembangan strategi pada sektor unggulan di Kabupaten Lebak.

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kekuatan sektor pertanian dan perikanan di dukung oleh masih banyaknya lahan pertanian, kehutanan, dan pantai. kondisi geografis di Lebak memiliki iklim yang baik untuk bercocok tanam dan perkebunan, terutama dalam produksi padi sawah untuk sektor pertanian. Kondisi sektor perkebunan juga sangat baik terutama untuk perkebunan Karet, Kelapa sawit, Kakao, Kopi robusta, Aren, Cengkeh, Kelapa, Kelapa hybrid, Lada, Pandan, Teh, Jambu mete, Panili, Jarak Pagar. Kabupaten Lebak memiliki garis pantai yang cukup signifikan yang menjadikan kabupaten lebak sebagai penghasil ikan laut. Tetapi masih ada beberapa kelemahan yang dihadapi antara lain lemahnya Sumber Daya Manusia, dukungan infrastruktur, regulasi serta fokus pembangunan wilayah masih belum diprioritaskan. Untuk mengoptimalkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai pendorong PAD maka yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak adalah :

- a. Peningkatan kualitas SDM sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan agar lebih produktif dalam mengoptimalkan kekuatan sumber daya yang ada.
- b. Membangun, memperbaiki infrastruktur yang menunjang sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- c. Kebijakan pemerintah harus memfasilitasi tumbuhnya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Fasilitasi teknologi Pertanian dan Kelautan untuk meningkatkan produktifitas
- d. Koordinasi antar lembaga dan dinas dalam meningkatkan produksi Pertanian dan perikanan
- e. Memfasilitasi kerjasama yang mendukung pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

2. Pertambangan dan Penggalian

Kabupaten lebak memiliki sumberdaya pertambangan yang kaya. Kekayaan tambang tersebut terdapat produk tambang logam dan non logam. Untuk potensi logam tersebut tersebar di

wilayah Kecamatan Bayah, Panggarangan, Cihara, Cilograng, Cibeber, Gunungkencana. Sebab, di daerah itu memiliki cekungan yang menyimpan kekayaan produk tambang logam. pertambangan lainnya yakni jenis non logam, seperti pasir kuarsa, batu belah, tras, lempung dan golongan batu bara. Kekayaan potensi alam itu berada di Kecamatan Leuwidamar, Cirinten, Ciminyak, Banjarsari, Cipanas, Sajira, dan Cimarga. Kelemahan yang dihadapi Kabupaten Lebak terkait pemanfaatan sumberdaya sektor Pertambangan dan Penggalian sehingga belum teroptimalkan sebagai penggerak perekonomian daerah adalah masih lemahnya regulasi sehingga masih banyak penambangan liar terutama untuk tambang non logam, ketidakmampuan SDM lokal dalam menciptakan nilai tambah dari sumberdaya yang ada. Untuk mengoptimalkan sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai pendorong PAD maka yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak adalah :

- a. Membuat regulasi melalui PERDA tentang perizinan pemanfaatan sumberdaya pertambangan dan penggalian non logam.
- b. Mengoptimalkan pengawasan terkait pelaksanaan PERDA tentang perizinan pemanfaatan sumberdaya pertambangan dan penggalian non logam.
- c. Merancang program pengembangan SDM sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya pertambangan dan penggalian non logam.
- d. Pengembangan industri kreatif, sehingga mampu memberikan nilai tambah, tidak sekedar menjual mentah hasil penggalian sumber daya

3. Industri Pengolahan

Perkembangan industri semakin menggeliat sejak tiga tahun terakhir, kekuatan untuk berkembangnya sektor industri adalah ditetapkan lima kecamatan di Kabupaten Lebak menjadi kawasan industri. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Rangkasbitung, Maja, Curugibitung, Bayah, dan Kecamatan Cilograng, dengan luas lahan mencapai ribuan hektare. masalah lahan, upah buruh, dan akses menuju Jakarta yang relatif lebih dekat juga menjadi kekuatan berkembangnya sektor industri di kabupaten lebak. Permasalahan klasik yang menjadi Kelemahan yang dihadapi terkait perkembangan sektor industri pengolahan adalah kesiapan SDM untuk ikut berperan dalam sektor tersebut dan jaringan infrastruktur yang masih menjadi kendala. Untuk mengoptimalkan sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai pendorong PAD maka yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak adalah :

- a. Kebijakan pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan infrastruktur penunjang di kabupaten Lebak.

- b. Kebijakan Pemerintah untuk pengembangan SDM, misalnya membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.

4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Berkembangnya perekonomian disekitar Banten berimplikasi pada perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Secara geografis Kabupaten Lebak dekat dengan Ibu Kota Jakarta, Tangerang Raya dan Bogor hal ini berimplikasi pada bertumbuhnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dikabupaten Lebak. Kelamahan yang terjadi pada sektor ini adalah masalah pemerataan, karena perkembangan sektor ini hanya terjadi didaerah tertentu dan tidak banyak masyarakat kabupaten Lebak yang mengambil manfaat dari sektor tersebut. Untuk mengoptimalkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai pendorong oeningkatan PAD maka yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak adalah :

- a. Mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari bisnis Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan cara intenifikasi dan ekstensifikasi perpajakan daerah.
- b. Membantu memfasilitasi pengembangan SDM, misalnya membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.

5. Real Estate

Kekuatan berkembangnya sektor ini dikabupaten Lebak adalah Berkembangnya bisnis properti dikawasan Kecamatan Maja, Curugbitung, Rangkasbitung, Kalang Anyar, Cibadak, dan Lebak bagian selatan. Dukungan Infrastruktur dengan adanya pembangunan jalan tol Jakarta-Panimbang yang melintasi wilayah Kabupaten Lebak. Dukungan sarana transportasi dengan dioperasikannya kereta rel listrik (KRL) Commuter Line rute Rangkasbitung-Maja-Jakarta. Sedangkan kelemahan berkembangnya sektor ini dikabupaten Lebak adalah termarginalkannya penduduk lokal karena pelaku bisnis pada sektor realestate bukan penduduk lokal, kelemahan lainnya adalah tidak opetimalnya pendapatan dari pajak daerah karena kemampuan administrasi perpajakan. Untuk mengoptimalkan sektor real estate sebagai pendorong PAD maka yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana dikutip dalam [mhttp://www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id), adalah mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dengan cara Mendorong Pemda untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas pemungutan penerimaan pemda dari sektor properti dalam batas-batas yang diatur oleh perundang-undangan, diantaranya melalui: (1) melakukan penyesuaian NJOP mendekati nilai pasar secara berkala; (2) melakukan

penelusuran dan penagihan piutang PBB-P2; (3) menyiapkan sistem pembayaran pajak daerah secara *online*; dan (4) meningkatkan sosialisasi manfaat membayar pajak kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen terdapat lima sektor yang dikalsifikasikan sebagai sektor unggul, yaitu sektor (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Pertambangan dan penggalan, (3) Industri Pengolahan (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (5) Real Estate.

Kemandirian keuangan daerah dilakukan dengan meningkatkan penerimaan daerah, untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten lebak, maka sektor-sektor unggulan tersebut merupakan potensi yang dimiliki yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah sebagai pendorong pertumbuhan PAD di Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman, Nurhandayani, 2016, Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Langsung, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 12, Desember 2016
- Febby Randria Ramadhani 2016, Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.01 Juni 2016
- Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2016, <https://lebakkab.bps.go.id/publication/>
- Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2017, <https://lebakkab.bps.go.id/publication/>
- Laedy Tamboto., J. Morasa., L. Mawikere (2014), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 755-767
- Luh Nyoman Fajar Nur Ayu, Ni Luh Putu Wiagustini, 2016, Potensi Ekonomi Daerah Propinsi Bali, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 12, 2016: 7528-7554
- Mahmudi. 2009, Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mukhtar Hakim, Ma'mun Sarma, Harianto; 2018, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anabas, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Volume 10 Nomor 1.
- Putri Nia Desita, 2015, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru 2010 – 2014, Jom FEKON Vol. 2 No. 2
- R. Agoes Kamaroellah, 2017, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017
- Rinaldi Syahputra, 2017, Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang, *Jurnal Samudra Ekonomi*, Vol.1, No. 1